

KOMUNIKASI DAN SUMBER DAYA DALAM IMPLEMENTASI PROGRAM E-WARONG KUBE PKH

Ariesta Amanda

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Sosial, Ekonomi dan Humaniora,
Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto, Indonesia
Email: a.amanda@unupurwokerto.ac.id

Lupita Ariantika Sari

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Sosial, Ekonomi dan Humaniora,
Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto, Indonesia
Email: la.sari@unupurwokerto.ac.id

Thahrina Azriah

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Sosial, Ekonomi dan Humaniora,
Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto, Indonesia
Email: t.azriah@unupurwokerto.ac.id

ABSTRACT

This research is entitled “Communication and Resources in the Implementation of the E-Warong Kube PKH Program. This research is motivated by the existence of the E-Warong KUBE-PKH program, the distribution of social assistance has shifted from being initially cash to non-cash. The purpose of this study is to describe how communication and resources are in the Implementation of the Electronic Program of the Mutual Cooperation Stalls Joint Business Group for the Family Hope Program (E-Warong Kube PKH) in Banyumas Regency. This study was used qualitative research methods. The informant selection technique used was purposive sampling technique. Methods of data collection employed were interviews, observation, and documentation. The results of the study show that the implementation of the Mutual Cooperation Warung Electronic Program for the Family Hope Program (E-Warong Kube PKH) in Banyumas Regency has been running optimally. Communication runs quite optimally and there is coordination between parties. The communication methods used are formal and informal. Informal communication via WA groups is very helpful in exchanging information, especially when it comes to disbursing aid, obstacles and handling them. The intensity of the communication carried out was quite good, it was just lacking in terms of delivering the detailed functions and benefits of the E-Warong Kube-PKH program. Human and financial resources are sufficient, but human resources in terms of competence there are still actors who come from low KPM resources or come from pre-prosperous families so that they have not been able to maximize the implementation of KUBE E-Warong development.

Keywords: implementation; communication; E-Warong Program; resource.

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Komunikasi Dan Sumber Daya Dalam Implementasi Program E-Warong Kube PKH. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya program E-Warong KUBE-PKH, penyaluran bantuan sosial beralih dari yang awalnya tunai menjadi non tunai. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana komunikasi dan sumber daya dalam Implementasi Program Elektronik Warung Gotong Royong Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan (E-Warong Kube PKH) di Kabupaten Banyumas. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Teknik pemilihan informan menggunakan teknik purposive sampling. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan

dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan implementasi Program Elektronik Warung Gotong Royong Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan (E-Warong Kube PKH) di Kabupaten Banyumas sudah berjalan secara maksimal. Komunikasi berjalan cukup optimal dan ada koordinasi antar pihak. Metode komunikasi yang digunakan ialah formal dan informal. Komunikasi informal via grup WA sangat membantu dalam tukar info terutama terkait ketika akan pencairan bantuan, kendala dan penanganannya. Intensitas komunikasi yang dilakukan cukup baik, hanya saja kurang dalam hal penyampaian fungsi dan manfaat detail program E-Warong Kube-PKH. Sumber daya manusia dan finansial sudah mencukupi, namun sumber daya manusia dari segi kompetensi masih terdapat aktor yang berasal dari sumber daya KPM yang masih rendah atau berasal dari keluarga pra sejahtera sehingga belum bisa maksimal dalam pelaksanaan pengembangan E-Warong KUBE.

Kata kunci: implementasi; komunikasi; Program E-Warong; sumberdaya.

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar dalam kehidupan sehari-hari. Kemiskinan menjadi permasalahan yang kompleks dan cenderung diartikan sebagai ketidakmampuan dalam hal ekonomi. Permasalahan yang dialami oleh Negara berkembang seperti Negara Indonesia diantaranya adalah masalah kemiskinan. Kemiskinan merupakan masalah sosial yang bersifat global. Artinya kemiskinan merupakan masalah yang harus dihadapi dan menjadi perhatian banyak orang di dunia. Masalah kemiskinan yang ada di Indonesia merupakan masalah sosial yang senantiasa dikaji secara terus menerus (Syahriani, 2016). Hal tersebut menunjukkan bahwa masalah kemiskinan bukanlah suatu permasalahan yang mudah namun dapat dikategorisasikan ke dalam suatu permasalahan yang sulit untuk diatasi. Pemerintah Indonesia sebenarnya sudah banyak mengeluarkan kebijakan terkait dengan masalah kemiskinan, namun sampai sekarang masalah kemiskinan masih banyak dijumpai di berbagai daerah. Kebijakan yang ada belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Berikut disajikan tabel jumlah penduduk miskin di Indonesia sejak tahun 2018 – 2020.

Tabel 1.1 Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada tahun 2018 - 2020

Bulan dan Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (juta jiwa)	% Jumlah Penduduk
Maret 2018	25,95	9,82
Maret 2019	25,14	9,41
Maret 2020	26,42	9,78

Sumber: Badan Pusat Statistik Tahun 2019

Berdasarkan tabel diatas, jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2018 sebesar 25,95 juta jiwa atau 9,82 persen. Sedangkan pada Maret 2019 jumlah penduduk miskin mengalami penurunan yaitu menjadi sebesar 25,14 juta jiwa atau 9,41 persen. Dan pada Maret 2020 jumlah penduduk miskin di Indonesia mengalami kenaikan yaitu menjadi sebesar 26,42 juta jiwa atau 9,78 persen (Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia, 2019).

Kemiskinan juga terjadi di Provinsi Jawa Tengah, tepatnya di Kabupaten Banyumas. Untuk lebih jelasnya berikut disajikan tabel mengenai keadaan kemiskinan di Kabupaten Banyumas sejak tahun 2018 – 2020, berdasarkan garis kemiskinan, jumlah penduduk miskin dan persentase penduduk miskin.

Tabel 1.2 Garis kemiskinan, jumlah, dan persentase penduduk miskin di Kabupaten Banyumas tahun 2018 – 2020

Tahun	Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan)	Jumlah Penduduk Miskin (ribu)	Persentase Penduduk Miskin
2018	366 442	226,20	13,50
2019	385 140	211,60	12,53
2020	406 250	225,80	13,26

Sumber: Data Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2021

Berdasarkan data tabel diatas menunjukkan bahwa, kemiskinan yang terjadi di Kabupaten Banyumas pada tahun 2018 yaitu sebesar 226,20 ribu atau 13,50 persen. Dan pada tahun 2019 mengalami penurunan sehingga jumlah penduduk miskin menjadi sebesar 211,60 ribu atau 12,53 persen. Akan tetapi pada tahun 2020 mengalami kenaikan yang cukup signifikan yaitu dengan jumlah penduduk miskin sebesar 225,80 ribu atau 13,26 persen (Banyumas, 2021).

Jumlah kemiskinan pada tahun 2020 di Kabupaten Banyumas termasuk dalam peringkat kedua jumlah kemiskinan terbanyak setelah Kabupaten Brebes. Kenaikan jumlah kemiskinan di Kabupaten Banyumas pada tahun 2020 diantara lain disebabkan oleh faktor adanya pandemi Covid- 19 dimana banyak warga masyarakat di Kabupaten Banyumas yang terkena PHK dikarenakan perusahaan yang menjadi tempat bekerja tidak dapat beroperasi secara maksimal bahkan ada yang menutup perusahaannya untuk sementara waktu. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Banyumas pada tahun 2020 adalah sebesar 225,80 (ribu) atau sekitar 13,26 %. Sedangkan Kabupaten Brebes

adalah sebesar 308,78 (ribu) atau sekitar 17,03% (Nuri Taufiq, Andhika Arie Prasetya, 2020).

Dalam mengatasi masalah kemiskinan pemerintah telah melakukan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat supaya dapat menjalankan fungsi sosialnya. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial menurut UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, diperlukan peran masyarakat yang seluas-luasnya, baik perseorangan, keluarga, organisasi keagamaan, organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, badan usaha, lembaga kesejahteraan sosial, maupun lembaga kesejahteraan asing demi terselenggaranya kesejahteraan sosial yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan. Dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan sekaligus pengembangan kebijakan di bidang perlindungan sosial, pemerintah melaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH) yakni program pemberian uang tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan dengan melaksanakan kewajibannya. Program Keluarga Harapan (PKH) di Indonesia telah dilaksanakan sejak tahun 2007 namun, di Kabupaten Banyumas baru dapat dilaksanakan pada tahun 2013. PKH pertama kali dilaksanakan di Indonesia pada tahun 2007.

Program Keluarga Harapan (PKH) dilaksanakan di seluruh provinsi di Indonesia. Namun dalam pelaksanaannya masih ditemukan permasalahan-permasalahan, antara lain komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung PKH masih kurang, proses validasi tidak sesuai dengan ketentuan sehingga hasil validasi tidak akurat, tidak adanya keseragaman kebijakan yang ditetapkan oleh Kemensos sehingga pembayaran bantuan menjadi kurang efektif dan monitoring rutin/berkala dan evaluasi belum dilaksanakan sesuai dengan pedoman umum. Berangkat dari permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dan arahan dari Presiden Joko Widodo kepada menterinya pada tanggal 26 April 2016 mengeluarkan program terbaru untuk menanggulangi masalah-masalah yang ada melalui Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Bantuan Pengembangan Sarana Usaha Melalui Elektronik Warung Gotong Royong Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan (E-Warong KUBE PKH).

Program elektronik Warung gotong royong Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan (E-Warong KUBE PKH) merupakan pengalihan bantuan sosial tunai menjadi bantuan sosial non tunai berbasis digital. Melalui program tersebut, pemerintah mengubah mekanisme penyaluran bantuan sosial secara tunai menjadi nontunai.

Untuk lebih jelasnya mengenai jumlah penerima PKH di Kabupaten Banyumas dari tahun 2018 - 2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.3 Jumlah penerima PKH di Kabupaten Banyumas tahun 2018 - 2021

Tahun	2018	2019	2020	2021
Jumlah	75.359	94.368	92.590	110.296

Sumber: UPPKH Kabupaten Banyumas Tahun 2021

Berdasarkan tabel diatas, jumlah penerima PKH di Kabupaten Banyumas pada tahun 2018 sebesar 75.359 kemudian pada tahun 2019 mengalami kenaikan menjadi sebesar 94.368 sedangkan pada tahun 2020 mengalami penurunan jumlah penerima sehingga menjadi sebesar 92.590 akan tetapi pada tahun 2021 mengalami peningkatan yang signifikan yaitu menjadi sebesar 110.296. Beberapa penelitian telah dilakukan terkait dengan Implementasi Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) melalui E-Warong salah satunya di teliti oleh Riana Pramesti Tahun 2019 di Kota Tanjungpinang yang mengacu kepada Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Bantuan Pengembangan Sarana Usaha Melalui Elektronik Warung Gotong Royong (E-Warong). Dalam hal pendistribusian BPNT melalui E-Warong cukup optimal walaupun masih ada beberapa faktor yang masih menjadi hambatan untuk melaksanakan implementasi BPNT ini yaitu seperti agen-agen maupun RPK yang dibentuk oleh pihak Bank tersebar banyak di Kota Tanjungpinang membuat persaingan penjualan dengan E-Warong para KPM. Akurasi data yang berkaitan dengan tidak semua masyarakat miskin yang terdaftar menjadi peserta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bantuan pangan non tunai. Hambatan dengan kartu KPM yang tidak bisa bertransaksi juga membuat jalannya bantuan tersebut belum optimal serta seringnya pemblokiran dana di setiap E-Warong oleh pihak Bank membuat semangat para pengelola E-Warong mulai sedikit luntur.

Melihat dinamika masyarakat di Kabupaten Banyumas, maka peneliti mengambil tema implementasi dalam penelitian ini namun lebih fokus kepada bagaimana komunikasi dan sumberdaya pada E-Warong yang telah berjalan di Kabupaten Banyumas. E-Warong KUBE di Kabupaten Banyumas pertama kali diluncurkan dan dibuka pada bulan Oktober 2018. Peluncuran program E-Warong Kube-PKH dimaksud sebagai tindak lanjut dari komitmen Kementerian Sosial dalam mengentaskan kemiskina. E-Warong KUBE PKH di Kabupaten Banyumas baru berjumlah 30 warong yang tersebar pada masing-masing kecamatan hingga kelurahan, namun tidak setiap kelurahan terdapat E-Warong KUBE-PKH.

Dalam implementasinya program E-Warong KUBE PKH di Banyumas tentunya memiliki berbagai macam pandangan baik dalam penerapannya yang berhasil maupun ditemukan kendala. Dengan adanya program E-Warong KUBE-PKH, penyaluran bantuan sosial beralih dari yang awalnya tunai menjadi non tunai. Melalui program e-Warong, masyarakat diuntungkan karena dapat menerima bantuan sesuai dengan jumlah, tepat waktu, dan tepat sasaran, serta tidak perlu mengantri lagi. Dalam hal ini peneliti ingin mengetahui respon masyarakat pada E-Warong KUBE di Kabupaten Banyumas setelah mendapatkan bantuan sosial melalui program E-Warong KUBE-PKH. Selain itu, melihat dari data Badan Pusat Statistik (BPS) 2018 jumlah penduduk miskin yang ada di Kabupaten Banyumas pada September 2018 mencapai 296.8 Ribu Jiwa. Kabupaten Banyumas termasuk urutan kedua jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah. Dengan adanya program E-Warong KUBE PKH apakah dapat mengurangi tingkat kemiskinan di Kabupaten Banyumas atau tidak sehingga peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana sumber daya dan komunikasi dalam Pengelolaan Program Elektronik Warung Gotong Royong Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan (E-Warong KUBE PKH) di Kabupaten Banyumas).

METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan di Kabupaten Banyumas ini menggunakan Metode penelitian kualitatif. Teknik pemilihan informan yang digunakan adalah *purposive sampling*. Sasaran penelitian penelitian ini adalah pihak-pihak yang berkaitan dalam proses komunikasi dan sumber daya Program Elektronik Warung Gotong Royong

Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan (E-Warong Kube PKH) di Kabupaten Banyumas yaitu Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Banyumas, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Penyaluran Bantuan Stimulan Dan Penataan Lingkungan, Koordinator PKH Kabupaten Banyumas, Pendamping Sosial E-Warong KUBE PKH, Koordinator TKS & Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Kabupaten Banyumas, Operator E-Warong KUBE PKH, dan Masyarakat KPM di Kabupaten Banyumas. Teknik pengumpulan data pun dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sementara itu, teknik analisis data terdiri dari mengorganisasikan data, pengelompokan berdasarkan kategori, tema dan pola jawaban, mencari alternatif penjelasan bagi data dan hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keberhasilan suatu implementasi juga dapat ditentukan oleh beberapa variabel lain. Menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Winarno, 2012:124) menyatakan beberapa variabel yang diyakini dan mempengaruhi implementasi dan kinerja kebijakan. Variabel ini dinilai saling berkaitan erat dalam proses implementasi kebijakan. Beberapa variabel yang terdapat dalam model Van Meter dan Van Horn adalah standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi, karakteristik agen pelaksana, kondisi sosial, dan sikap para pelaksana.

1. Komunikasi

Keberhasilan dari implementasi kebijakan atau program dapat terwujud apabila komunikasi yang dijalin antar organisasi dan kegiatan-kegiatan berjalan dengan baik. Menurut Van Meter dan Van Horn (Wahab, 2008) agar komunikasi berjalan dengan efektif, maka badan-badan pelaksana harus mempunyai suatu pemahaman informasi yang sama. Hal tersebut harus dipahami oleh para individu (implementor). Implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lainnya. Untuk itu diperlukan koordinasi dan kerjasama antara instansi bagi keberhasilan suatu program dalam mencapai sasaran dan tujuan program.

Dalam mengimplementasikan program E-Warong Kube-PKH di Kabupaten Banyumas, Dinas Sosial bekerja sama dengan Bank Mandiri, Pendamping Sosial (Unit Pelaksana PKH, TSKS, TPFM), Kube Jasa, dan Bulog sebagai distributor.

Dalam penelitian ini proses komunikasi dibagi menjadi dua yaitu koordinasi dan sosialisasi. Sosialisasi terkait implementasi program E-Warong Kube-PKH di Kabupaten Banyumas pertama kali dilakukan oleh Dinas Sosial pada tahun 2018 sebelum dengan metode seminar yang dihadiri oleh menteri sosial di Baturaden. Kemudian ada juga sosialisasi dari Pendamping sosial dengan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yakni dengan sosialisasi dan edukasi. Komunikasi yang dilakukan terkait bantuan pangan non tunai bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada KPM tentang tujuan dan mekanisme pemanfaatan bantuan pangan non tunai, memberikan informasi tentang mekanisme pengaduan dalam pelaksanaan bantuan pangan non tunai.

Selain itu setiap bulan juga diadakan sosialisasi dari pihak yang berwenang dalam e-warung KUBE PKH yaitu pendamping PKH yang bertugas meningkatkan kapasitas KPM setiap dalam pertemuan, seperti dalam pendidikan dan perencanaan ekonomi. Pendamping mengarahkan KPM dalam perencanaan ekonomi bagaimana ekonomi ada perubahan untuk meningkatkan kesejahteraan salah satu bentuknya melalui KUBE. Tidak menutup kemungkinan semua kelompok membentuk kube hal ini karena keterbatasan sumber daya manusia yang sudah tidak produktif contohnya satu kelompok isinya lansia semua hal ini tidak mungkin untuk membentuk kube karena anggota ini bukan lagi usia produktif, sehingga pendamping tidak bisa memaksakan kelompok untuk membentuk KUBE. KUBE ini memang tidak diwajibkan tetapi mengarahkan KUBE ini wajib, karena melalui kube KPM dapat mandiri diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan untuk mengentaskan kemiskinan agar tidak bergantung pada bantuan pemerintah saja.

Koordinasi dalam pengelolaan Program E-Warong KUBE PKH di Kabupaten Banyumas sudah berjalan dengan baik. Koordinasi dilaksanakan secara berjenjang, dari Dinas Sosial Kabupaten Banyumas, Kecamatan, kemudian ke masyarakat penerima. Dalam setiap kecamatan sudah terdapat Pendamping

sosial, Satu pendamping sosial mendampingi 20 kelompok yaitu 300 peserta. Koordinasi dari pendamping dalam satu korp kecamatan mempunyai koordinator kecamatan, manakala terdapat kebijakan internal kabupaten, langsung ke koordinator Dinas Kabupaten.

Proses komunikasi dalam pengelolaan Program E-Warong KUBE PKH Kabupaten Banyumas sudah cukup baik. Komunikasi yang dilakukan antar Unit Pelaksana PKH dengan masyarakat penerima bantuan tergolong intens. Selain itu, komunikasi juga intens dilakukan dalam grup WA (Whatsapp) yang dibuat oleh Pendamping PKH, sehingga memudahkan antar pihak yang terlibat dalam melakukan proses sharing dan tanya jawab terkait pelaksanaan program E-Warong Kube-PKH dan memudahkan ketika akan pencairan bantuan. Setiap pencairan bantuan setiap bulan, Bank Mandiri memberi tahu ke Dinas Sosial kemudian membuat surat edaran kepada kecamatan untuk memberitahukan tanggal pencairannya kepada KPM. Lebih daripada itu, komunikasi juga dilakukan melalui sidak langsung yang dilakukan oleh Dinas Sosial kepada Kube Jasa dan KPM yang mengalami kendala pencairan bantuan sosial.

Komunikasi melalui grup WA, pertemuan rutin, dan sidak langsung ke lapangan tentu sangat membantu dalam kelancaran penyampaian arus informasi terkait pelaksanaan program E-Warong Kube-PKH. Sehingga, berbagai kendala di lapangan dapat diatasi dengan lebih cepat. Namun, yang perlu diperhatikan ialah isi dari informasi yang disampaikan perlu lebih mendetail dan memahami bahwa fungsi E-Warong Kube-PKH tidak sekedar sebagai tempat pencairan bantuan sosial saja akan tetapi masih banyak fungsi lain seperti sebagai tempat pemasaran hasil Kube dan tempat layanan koperasi simpan pinjam. Sehingga pemanfaatan E-Warong Kube-PKH dapat lebih maksimal.

2. Sumber Daya

Sumber daya merupakan yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan publik. Menurut Indiahono (2009:39) sumber daya tersebut meliputi sumber daya manusia dan sumber daya finansial. Sumber daya manusia adalah kecukupan baik kualitas maupun kuantitas implementor yang dapat melingkupi

seluruh kelompok sasaran. Sedangkan sumber daya finansial adalah kecukupan modal investasi atas sebuah program atau kebijakan. keduanya harus diperhatikan dalam implementasi kebijakan pemerintah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sumber daya manusia sudah mendukung dalam pengelolaan program E-Warong Kube-PKH di Kabupaten Banyumas. Berdasarkan hasil penelitian, sumber daya manusia pengelolaan program E-Warong Kube-PKH di Kabupaten terdiri dari Dinas Sosial, Kecamatan (TKSK), Pendamping KPM yang bertugas untuk memantau berjalannya program. Jumlah aktor/sumber daya manusia yang terlibat dalam pengelolaan program E-Warong Kube-PKH di Kabupaten Banyumas sudah mencukupi. Aktor-aktor tersebut mempunyai tugas dan tanggungjawab masing-masing dalam pelaksanaan program E-Warong Kube-PKH. Namun, jumlah E-Warong di Kabupaten Banyumas masih kurang karena belum semua kecamatan memiliki e-warung KUBE PKH.

Dalam menjalankan fungsi E-Warong baik sebagai titik penyaluran dana/penjualan “sembako” murah bagi penerima bansos nontunai, dibentuk Kube Jasa sebagai pengelola E-Warong Kube Jasa terdiri atas satu orang pendamping dan sepuluh orang anggota (tiga orang pengurus dan tujuh orang anggota). Kube Jasa bertanggung jawab atas keberlangsungan usaha E-Warong, termasuk mengelola stok barang dan lalu lintas transaksi keuangan. Usaha tersebut dilakukan secara bersama-sama. Namun, tidak semua kelompok dapat membentuk KUBE. Hal ini karena keterbatasan sumber daya manusia yang sudah tidak produktif. Contohnya satu kelompok isinya lansia semua hal ini tidak mungkin untuk membentuk kube karena anggota ini bukan lagi usia produktif, sehingga pendamping tidak bisa memaksakan kelompok untuk membentuk KUBE. Selain itu kendala KUBE yaitu pada sumber daya KPM yang masih rendah atau berasal dari keluarga pra sejahtera sehingga belum bisa maksimal dalam pelaksanaan pengembangan E-Warong KUBE.

Sumber dana atau sumber daya finansial bantuan program E-Warong Kabupaten Banyumas dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) berasal dari APBN. Pemberian bantuan modal dan alat pun diberikan agar produk KUBE

semakin baik (misalnya pemberian bantuan berupa alat dalam produksi telur asin). Untuk bantuan permodalan pembentukan e warong Kube baru ada pada tahun 2020. Sedangkan sumber pendanaan pemenuhan kebutuhan e-warung yaitu kas dari kelompok pengelola E-Warong Kube Jasa tersebut. Serta dana Rp. 110.000 yang masuk ke setiap ATM KPM lancar setiap bulannya. Sejauh ini semua stakeholder dari tingkat kabupaten sampai desa mendukung adanya KUBE tersebut. Terdapat bantuan lain seperti 10 KUBE mendapat bantuan dari Bank Indonesia.

KESIMPULAN

Bila dilihat dari bentuk programnya, E-Warong Kube-PKH hanya bersifat sebagai suplemen bagi upaya peningkatan kesejahteraan sosial di Indonesia. Dampak program diharapkan mampu untuk meminimalisir terjadinya tindak korupsi bantuan sosial, mengenalkan modernisasi kepada masyarakat miskin, dan mengembangkan strategi pengentasan kemiskinan. Komunikasi dan sumber daya dalam Pengelolaan Program Elektronik Warung Gotong Royong Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan (E-Warong Kube PKH) di Kabupaten Banyumas sudah berjalan secara maksimal. Metode komunikasi yang digunakan ialah formal dan informal. Komunikasi informal via grup WA sangat membantu dalam tukar info terutama terkait ketika akan pencairan bantuan, kendala dan penanganannya. Intensitas komunikasi yang dilakukan cukup baik, hanya saja kurang dalam hal penyampaian fungsi dan manfaat detail program E-Warong Kube-PKH.

Sumber daya manusia dan finansial sudah mencukupi, namun sumber daya manusia dari segi kompetensi masih terdapat aktor yang berasal dari sumber daya KPM yang masih rendah atau berasal dari keluarga pra sejahtera sehingga belum bisa maksimal dalam pelaksanaan pengembangan E-Warong KUBE.

Mengingat pelaksanaan E-Warong masih baru dan perangkat regulasinya belum tersedia, maka belum ada kegiatan monev. Meskipun demikian, dalam rangka melaksanakan tugasnya, pendamping PKH merasa bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan sehari-hari atas operasi E-Warong. Dalam hal ini, pada

Amanda, Ariesta., Sari, Lupita Ariantika., & Azriah, Thahrina. (2022). Komunikasi dan Sumber Daya Dalam Implementasi Program E-Warong Kube PKH. *Economics, Social, and Humanities Journal (ESOCHUM)*. 1(2). 83-94.

umumnya mereka hanya berkomunikasi dengan pengelola/operator E-Warong ketika ada masalah, terutama mengenai pasokan barang Bulog dan TIK bank.

DAFTAR PUSTAKA

- Bungin, Burhan. 2011. *Penelitian Kualitatif Edisi Kedua (Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya)*. Jakarta: Kencana Prenanda Media Group.
- Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Yogyakarta: Gaya Media.
- Indrajit, R. 2002. *Electronic Government (Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital)*. Yogyakarta: Andi.
- Main, Abdul. 2010. *e-Government: Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital*. Balai Diklat Keagamaan.
- Nugroho, Riant. 2014. *Public Policy Edisi 5*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik: Teori, Proses, Dan Studi Kasus*. Jakarta: Pt. Buku Seru.
- Pramesti, Indira Putri dkk. 2018. *Implementasi Program E-Warong KUBE Srikandi Di Kota Malang Tahun 2017 (Studi Di Kelurahan Bareng, Kecamatan Klojen)*. Jurnal Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Vol. 03 No. 2.
- Pramesti, Riana dkk. 2019. *Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai Melalui Elektronik Warung Gotong Royong Di Kota Tanjung Pinang*. Spirit Publik. Vol. 14: 81-93.
- Turtiantoro, Yanthuridi. 2018. *Implementasi Program E-Warong KUBE-PKH Di Kota Semarang*. Journal of Politic and Government Studies, Vol. 8, No. 1: 231-240.
- Badan Pusat Statistik Tahun 2018 Tentang Angka Kemiskinan Indonesia.
- Badan Pusat Statustik Tahun 2019 Tentang Angka Kemiskinan Kabupaten Banyumas.